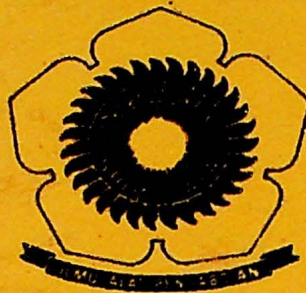


**EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN
SURAT SITATERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DI
KPP PRATAMA PALEMBANG**



Skripsi oleh:

AULIA SABRINA

NIM: 01071003042

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2011**

336.207

Aul

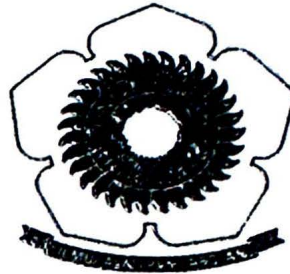
c

2011

Record : 2211 P

Reg : 22 SB1

**EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN
SURAT SITATERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DI
KPP PRATAMA PALEMBANG**



Skripsi oleh:

AULIA SABRINA

NIM: 01071003042

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**NAMA : AULIA SABRINA
NIM : 01071003042
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT SITA
TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN
PAJAK DI KPP PRATAMA PALEMBANG**

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN


DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 04 AGUSTUS 2011 Ketua

: 

**Hj. Rochmawati Daud, SE, Msi, Ak
NIP 196409031994032001**

Tanggal 04 AGUSTUS 2011 Anggota

: 

**Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak
NIP 196209131994032001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Sabrina

NIM : 01071003042

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :**“Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang”**.

Pembimbing

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak

Anggota : Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak

Tanggal diuji : 03 Agustus 2011

adalah benar- benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 03 AGUSTUS 2011

Yang memberi pernyataan,



Aulia Sabrina

NIM 01071003042

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Aulia Sabrina

NIM : 01071003042

Jurusan : Akuntansi

Judul : Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita

Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang

telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 04 AGUSTUS 2011

Pembimbing Skripsi

Ketua,

Anggota,



(Hj. Rochmawati Daud, SE, MSi, Ak)

NIP. 196409031994032001



(Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak)

NIP. 196209131994032001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**NAMA : AULIA SABRINA
NIM : 01071003042
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT TEGURAN,
SURAT PAKSA DAN SURAT SITA TERHADAP
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP
PRATAMA PALEMBANG**

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 03 Agustus 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 03 AGUSTUS 2011

Ketua,



Hj. Rochmawati Daud ,SE,M.Si,Ak

NIP 196707011992032003

Anggota,



Dewi Rina K,SE,MM,Ak

NIP 196209131994032001

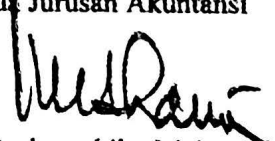
Anggota,



Sulaiman S.M.,SE,MBA,Ak

NIP 196301201992031002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi**



Drs. Burhanuddin, M.Acc,Ak

NIP 195808281988101001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, namun Allah akan mengubah segalanya menjadi indah di waktu yang tepat."

"Berus mencoba, berdoa dan berusaha, akibat semua itu akan ada jalan menuju kesuksesan."

Persembahan:

- > Allah SWT
- > Kedua orang tuaku
- > Adikku
- > Keluarga Besaraku
- > Kumpulanku
- > Sahabat-Sahabatku
- > Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang”, yang merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab VI Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2006-2010 jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dinilai tidak efektif dengan pembayaran tunggakan pajaknya karena jumlah penerbitan yang berfluktuatif menyebabkan pembayaran tunggakan pajak dari tahun ke tahun tidak stabil dan berbanding terbalik dikarenakan kenaikan penerbitan atau penurunan surat teguran maupun surat paksa berfluktuasi, pembayaran tunggakan pajaknya tidak mengalami penurunan yang jauh atau peningkatan yang jauh dari tahun sebelumnya. Untuk persentase penerbitan jumlah surat teguran dan surat paksa, di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, surat teguran memiliki persentase yang lebih besar dan menurun untuk surat paksa, sedangkan untuk KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerbitan surat tegurancenderung naik dan rata-rata persentase surat paksa masih lebih besar dari KPP Palembang ilir Barat.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja serta merasa dibebankan atau diberatkan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Disamping itu pula, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Penulis,

Aulia Sabrina

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita Terhadap Pembayaran Tunggalan Pajak di KPP Pratama Palembang”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal, A.K, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Sulaiman S.M., SE, MBA, Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Dewi Rina Komarawati, SE, MM Ak, Dosen Pembimbing Akademik.
6. Hj. Rochmawati Daud. SE, MM, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi.
7. Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi.
8. Sulaiman Surya M, SE, MBA, Ak, Anggota Penguji Ujian Komprehensif.
9. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Semua staf dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Kepala dan staf KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku (Ali Sobri, S.E dan Ernawati Lomban) dan adikku (M. Ardiansyah) yang telah memberikan nasihat, dukungan, doa, bantuan serta perhatian yang sangat besar.
13. Semua keluarga besarku, khususnya Nusur Rahmawaty yang telah banyak membantu, Nenek dan Kakek, yang telah mendoakan saya dalam menyelesaikan perkuliahan, dan semua keluarga yang telah mendoakan dan mendukung kuliah saya selama ini.

14. Kurniawan terimakasih untuk semua dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa selama penulisan skripsi ini dan untuk semuanya You're the great one.
15. Semua teman baikku Ayu Eka, Gusti Pratiwi, Betharia indah, Nanda Rizky, Tammy Adistia, Adyn Purnama, Aldi Prima, Nyayu Ika, Septi Zhumi, Widya Dj, Widya Paranita, Nur Anggraini, Aang dan semua pihak yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman angkatan 2007, teman seperjuangan untuk kompre dan skripsi serta kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
17. Teman baikku SMA Negeri 5 Palembang Mutasa Tiara, Hendrastita, Indri Hafsari dan Anggy Paramitha yang telah banyak mendoakan dan memberi dukungan.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin.

Penulis,

Aulia Sabrina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI / TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAKSI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5.2. Jenis dan Sumber Data	7
1.5.2.1 Jenis Data	7
1.5.2.2 Sumber Data	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.4 Metode Analisis Data	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Dasar-dasar Perpajakan	13
2.1.1. Pengertian Pajak	13
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Pembagian Jenis Pajak	16
2.1.4. Prinsip Pemungutan Pajak	17
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.6. Cara Pemungutan Pajak	19
2.1.7. Asas Pemungutan Pajak	20
2.1.8. Perlawanan Terhadap Pajak	20
2.1.9. Reformasi Perpajakan di Indonesia	21
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.3. Efektivitas	26
2.4. Surat Teguran	26
2.5. Surat Paksa	28
2.6. Surat Sita	31
2.7. Pengertian Penagihan Pajak	31
2.7.1. Dasar Penagihan Pajak	32
2.7.2. Tindakan Penagihan Pajak	33
2.7.3. Fokus dan Strategi Penagihan Pajak	33

2.7.4. Tujuan dan Taktik Penagihan Pajak.....	35
2.7.5. Kebijakan dan Prosedur Penagihan Pajak.....	35
2.8. Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, dan Penanggung Pajak	36
2.9. Utang Pajak	37
2.10. Tunggakan Pajak.....	38
2.11. Jurusita Pajak	38
2.12. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat paksa, dan Surat Sita.....	39
2.12.1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	39
2.12.2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	40
2.12.3. Penagihan Pajak dengan Surat Sita.....	40
2.13. Penelitian Terdahulu	40

BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG

3.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP).....	42
3.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	44
3.1.2. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur	45
3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas KPP	47
3.3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak	55
3.3. Data dan Fakta Penelitian	57

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Dan Palembang Ilir Timur.....	64
4.1.1. KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	64
4.1.2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	71
4.2. Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Jumlah Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur	80
4.2.1. KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	80
4.2.2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	85
4.3. Kendala – Kendala yang dihadapi dan Upaya Penyelesaian KPP Pratama Palembang Terhadap Wajib Pajak yang Menunggak	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	99
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2006 KPP Pratama Palembang Ilir Barat	58
Tabel 3.2.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2007 KPP Pratama Palembang Ilir Barat	58
Tabel 3.3.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2008 KPP Pratama Palembang Ilir Barat	58
Tabel 3.4.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2009 KPP Pratama Palembang Ilir Barat	59
Tabel 3.5.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2010 KPP Pratama Palembang Ilir Barat	59
Tabel 3.6.	Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita dan Jumlah Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat ...	60
Tabel 3.7.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2006 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	61
Tabel 3.8.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2007 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	61
Tabel 3.9.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2008 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	61
Tabel 3.10.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2009 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	62
Tabel 3.11.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT Tahun 2010 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	62
Tabel 3.12.	Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita dan Jumlah Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur..	63
Tabel 4.1.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Tahun 2006-2010 KPP Pratama Palembang Ilir Barat	64
Tabel 4.2.	Persentase Jumlah Penerbitan Surat Teguran tahun 2006-2010 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	67
Tabel 4.3.	Persentase Jumlah Penerbitan Surat Paksa tahun 2006-2010 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	69
Tabel 4.4.	Data Jumlah Penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Tahun 2006-2010 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	71
Tabel 4.5.	Persentase Jumlah Penerbitan Surat Teguran tahun 2006-2010 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	73
Tabel 4.6.	Persentase Jumlah Penerbitan Surat Paksa tahun 2006-2010 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	74
Tabel 4.7.	Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Jumlah Penerbitan Surat Teguran pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	80
Tabel 4.8.	Perbandingan Penerbitan Surat Teguran dengan Pembayaran Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	82
Tabel 4.9.	Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Jumlah Penerbitan Surat Paksa pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	83
Tabel 4.10.	Perbandingan Penerbitan Surat Paksa dengan Pembayaran Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	84

Tabel 4.11. Pembayaran Tunggalan Pajak dengan Jumlah Penerbitan Surat Teguran pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur	85
Tabel 4.12. Perbandingan Penerbitan Surat Teguran dengan Pembayaran Tunggalan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	87
Tabel 4.13. Pembayaran Tunggalan Pajak dengan Jumlah Penerbitan Surat Paksa pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur	88
Tabel 4.14. Perbandingan Penerbitan Surat Paksa dengan Pembayaran Tunggalan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Prosedur Penerbitan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur	30
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat	53
Gambar 3.3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	54
Gambar 4.1.	Grafik Data Penerbitan Surat STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Teguran, Surat Paksa,dan Surat Sita pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	65
Gambar 4.2.	Grafik Data Penerbitan Surat STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Teguran, Surat Paksa,dan Surat Sita pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur	71
Gambar 4.3.	Perbandingan Grafik Perkembangan Tingkat Persentase Efektivitas Penerbitan Surat Teguran antara KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur	76
Gambar 4.4.	Perbandingan Grafik Perkembangan Tingkat Persentase Efektivitas Penerbitan Surat Teguran antara KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur	78

**Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita
Terhadap Pembayaran Tunggakan pajak di KPP Pratama
Palembang**

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap pembayaran tunggakan pajak efektif pada kedua KPP Pratama di Palembang. Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian kausal, dengan data penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, surat teguran, surat paksa, surat sita dan jumlah pembayaran tunggakan pajak dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu yang berkaitan dengan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, surat teguran, surat paksa dan surat sita, dan jumlah pembayaran tunggakan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2006-2010 jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dinilai tidak efektif dengan pembayaran tunggakan pajaknya karena jumlah penerbitan yang berfluktuatif menyebabkan pembayaran tunggakan pajak dari tahun ke tahun tidak stabil dan berbanding terbalik dikarenakan kenaikan penerbitan atau penurunan surat teguran maupun surat paksa berfluktuasi, pembayaran tunggakan pajaknya tidak mengalami penurunan yang jauh atau peningkatan yang jauh dari tahun sebelumnya. Untuk persentase penerbitan, di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, surat teguran memiliki persentase yang lebih besar dan menurun untuk surat paksa, sedangkan untuk KPP Pratama Palembang Ilir Timur penerbitan surat teguran cenderung naik dan rata-rata persentase surat paksa masih lebih besar dari KPP Palembang ilir Barat.

.

Kata kunci: Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Tunggakan Pajak, Wajib Pajak

***Effectiveness of Publishing Warning Letter, Forced Letter, and Letter of Sita
Against payment of tax arrears in the KPP Pratama Palembang***

Abstract

This study aimed to test whether number of issuing letters of reprimand, letters of force, and seized a letter to the payment of tax arrears effectively in both KPP Pratama in Palembang. Research methodology in this thesis is to use causal research design, data publishing STP, SKPKB, SKPKBT, letters of reprimand, forced letter, letter of confiscation and the amount of unpaid taxes from 2006 to 2010. The types of data used are secondary data. Data obtained from KPP Pratama Ilir Palembang Barat and KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data were analyzed by qualitative descriptive analysis method that is related to the issuance of STP, SKPKB, SKPKBT, letters of reprimand, letters and letter forcibly seized, and the amount of unpaid taxes.

The results showed during the years 2006-2010 the number of publishing a letter of reprimand, letters of forced judged ineffective due to the payment of tax arrears fluctuated number of publications that led to the payment of tax arrears from year to year are unstable and inversely due to the increase or decrease in the issuance of letter of reprimand or letter of forced fluctuates, tax arrears payment does not decline much or much improvement from the previous year. For the percentage of publishing, in KPP Pratama Ilir Palembang West, warning letters have a greater percentage and forced down to the letter, while for the KPP Pratama Palembang Ilir Timur issuing warning letters tend to rise and the average percentage of letters still greater force than KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Keywords: *Tax, warning letter, Forced Letter, Letter of Sita, Tax Arrears, Tax Payer*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berkewajiban memenuhi kepentingan masyarakatnya baik dalam bidang keamanan, ekonomi, social, budaya termasuk didalamnya peningkatan kesejahteraan umum dan kecerdasan penghidupan bangsa. Tugas negara tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya kegiatan pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun untuk menggerakkan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan ujung tombak pemerintah dalam menghimpun sumber-sumber penerimaan negara dalam hal ini penerimaan pajak.

Saat ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Dalam APBN 2010 dari struktur penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah, maka penerimaan perpajakan merupakan pengkontribusi jumlah yang terbesar.

Dalam melakukan suatu pembangunan di suatu negara, pemerintah memerlukan dana. Dana-dana yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan dan aktivitas-aktivitas negara diperoleh dari pendapatan negara.

Terdapat dua sumber pendapatan negara yaitu dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu pendapatan negara dalam negeri adalah pajak.

Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar dari pendapatan-pendapatan negara lainnya pendapatan non pajak dan hibah. Data dari badan kebijakan fiscal kementerian keuangan Republik Indonesia APBN menunjukkan persentase pendapatan negara, ditahun 2008 pendapatan negara dari pajak sebesar 68,33%, non pajak 31,52% , hibah 0,14% , tahun 2009 sebesar 76,55%, non pajak 23,35%, hibah 0,1%, dan ditahun 2010 persentase pendapatan pajak sebesar 77,39%, non pajak 22,58%, dan hibah 0,04%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pembangunan di negara indonesia lebih dari 50% bersumber dari pajak. Semakin banyak masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, semakin lancarnya pembangunan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) berusaha keras dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya semestinya.

Target penerimaan pajak dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan apabila Wajib Pajak memahami benar hak dan kewajibannya dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang diberi kepercayaan untuk mengamankan penerimaan pajak harus mampu menjalankan tugas yang diamanatkan negara dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat

dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan fiskus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penerapan ketentuan hukum adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Masih menjadi anggapan dalam masyarakat bahwa pajak merupakan beban sehingga selalu dicari upaya untuk menghindari pajak. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan data maupun tidak melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dimana dalam sistem perundang-undangan pajak di Indonesia dengan jelas diberikan kewenangan kepada fiskus untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak.

Adanya upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dan keengganan untuk membayar pajak telah menyebabkan kerugian bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara dan harus segera masuk ke kas negara, hal ini disebabkan karena kebutuhan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan pemahaman bagi masyarakat mengapa mereka harus membayar pajak dan apa fungsi penerimaan negara dari sektor pajak.

Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus

dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya sering sekali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak.

Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa maupun surat sita sangat penting dilakukan agar tunggakan pajak tersebut dapat dilunasi oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan dari kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dibentuk undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa antara lain agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya tunggakan pajak, menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kepentingan negara, mengatur tindakan penagihan pajak, serta memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita diharapkan dapat membuat wajib pajak sadar tentang pembayaran tunggakan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT SITA TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur terhadap wajib pajak yang menunggak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menilai, dan membandingkan efektivitas surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat Dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur terhadap wajib pajak yang menunggak?
3. Untuk melihat tingkat ketidakpatuhan para wajib pajak dalam membayar utang pajaknya.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya diharapkan memberikan kontribusi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan mengenai perpajakan.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang perpajakan.
3. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Palembang Ilir Timur, sebagai bahan masukan dan referensi bagi instansi tersebut untuk melihat efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak dan melihat ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan analisa yang dibuat lebih terfokus pada masalah sehingga mencapai kesimpulan yang tepat, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu:

1. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Objek dari penelitian ini adalah penerbitan jumlah surat teguran, surat paksa, surat sita, Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh seksi penagihan terhadap variabel jumlah pembayaran tunggakan

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan 21 (PPh 21), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Aspek penelitian ini hanya terbatas pada jumlah penerbitan surat STP, SKPKB, SKPKBT, surat teguran, surat paksa, dan surat sita PPh, PPh 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 5 tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

1.5.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini, data dokumenter yang dimaksud adalah data jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita dan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan jumlah pembayaran tunggakan pajak.

1.5.2.2 Sumber Data

Dalam usaha untuk mencapai data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan data pendukung yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur. Sumber data yang digunakan adalah

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur atau langsung dari sumbernya yang belum diolah.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga Penulis dapat langsung menggunakannya.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi (*documentation*), metode ini dilakukan dengan meminta dokumen perusahaan yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam hal ini adalah jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita dan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan jumlah pembayaran tunggakan pajak.

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan penerbitan STP,SKPKB,SKPKBT, surat teguran, surat paksa dan surat sita, dan jumlah pembayaran tunggakan pajak. Variabel tersebut akan dibandingkan untuk dicari persentase efektivitas dan melihat ketidakpatuhan wajib pajak setiap tahunnya.

Sesuai dengan prosedur penagihan pajak, penagihan pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan yang di sampaikan dan disusun oleh wajib pajak sendiri yang dikenal dengan istilah *self assessment system*. Surat pemberitahuan tersebut diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dari hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan SKP untuk setiap wajib pajak. SKP yang dikeluarkan terdiri dari berbagai jenis yaitu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) bagi wajib pajak yang utangnya nihil.
- b. Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat tagihan kepada wajib pajak yang masih mempunyai utang pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) bagi wajib pajak yang pembayaran pajaknya lebih besar dari utang pajaknya dan kelebihan pembayaran akan dikembalikan.
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari kelima jenis SKP tersebut, hanya STP, SKPKB, dan SKPKBT yang dilakukan penagihan secara aktif kepada wajib pajak. Proses penagihan aktif dimulai dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat sita dan lelang.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita maka akan dicari persentase yang didapat dari jumlah STP,SKPKB,SKPKBT tersebut dibagi dengan penerbitan jumlah surat teguran, surat paksa, dan sita per tahun. Dari hasil tersebut dapat dilihat efektivitas penerbitan dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak serta akan dianalisis dan dibandingkan dalam melakukan pembayaran pajak setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak terhadap dua KPP Pratama Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis perlu menjelaskan secara garis besar batasan-batasan yang terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara bab yang satu disusun secara sistematis dan memiliki hubungan yang erat. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian meliputi ruang lingkup pembahasan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data yang dilakukan hingga sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang merupakan dasar bagi penyusunan skripsi ini. Penulis hanya menuliskan teori-teori yang mempunyai relevansi yang mendukung proses penulisan. Dalam bab ini diuraikan landasan teori mengenai pajak secara umum dan khusus yang meliputi pengertian, jenis, fungsi pajak, pembagian jenis pajak, sistem pemungutan pajak, cara pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, perlawanan terhadap pajak, wajib pajak, wakil wajib pajak, penanggung pajak, utang pajak, tunggakan pajak, pengertian penagihan pajak, dasar penagihan pajak, tindakan penagihan

pajak yang meliputi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat sita.

BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT DAN KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, mulai dari sejarah singkat berdirinya KPP, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, visi dan misi KPP, serta data dan fakta yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis perbandingan efektivitas penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak. Dianalisis dengan mencari persentase surat penerbitan yaitu surat teguran, surat paksa, dan surat sita agar dapat diketahui tentang efektivitas penerbitan dan untuk melihat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak pada KPP Pratama yang ada di Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas di

dalam penelitian ini dan juga memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Ginting, Riskon. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggalan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak Skripsi*. Universitas Indonesia. Depok.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Edisi Kesembilanbelas. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Edisi Kesembilanbelas. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Kumala, Nur. 2008. *Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Depok*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Octavia, Vivi. 2010. *Analisa Pengaruh Pertambahan Jumlah NPWP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palembang*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Pidekso, Ari, 2009. *SPSS 17 Untuk Pengolahan Data Statistik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi, 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi*. Edisi Pertama. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Edisi Pertama. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi FE UNSRI. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsri*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.

